

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Akuntansi

Menurut (Soetjipto, 2014) sebagai sistem informasi keuangan, akuntansi adalah proses tiga aktivitas : identifikasi, pencatatan dan komunikasi peristiwa ekonomi sebuah organisasi (bisnis dan non bisnis) bagi pengguna informasi.

1. Bagian pertama proses – identifikasi : berisi pemilihan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kepastian kegiatan ekonomi yang relevan untuk organisasi mandiri. Penjualan barang dagangan, pembayaran upah pekerja, dan penjualan tiket sepakbola adalah contoh kegiatan ekonomi.
2. Pada saat identifikasi dan pengukuran dalam rupiah, kegiatan ekonomi adalah melakukan pencatatan untuk menghasilkan riwayat yang permanen tentang keuangan organisasi. Catatan bertujuan menjaga kronologi peristiwa harian untuk pengukuran kejadian secara sistematis. Dalam catatan, kejadian juga dikelompokkan dan diringkas.
3. Kegiatan identifikasi dan pencatatan ini merupakan informasi sebagai komunikasi ke pemakai yang berkepentingan. Informasi adalah komunikasi menuju persiapan dan distribusi laporan akuntansi, biasanya disebut laporan keuangan (*financial statement*). Untuk membuat laporan informasi keuangan yang sangat berarti, akuntan menggambarkan dan melaporkan data pencatatan dalam sebuah cara yang distandarisasi.

Menurut (Priyanto, 2009) akuntansi berasal dari kata asing, yaitu *accounting* yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan proses mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan menyajikan laporan-laporan keuangan perusahaan atau lembaga secara sistematis.

Menurut APB *Statement* No. 4 tahun 1970 yang berjudul “*Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises*”, akuntansi adalah : ”sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada)” (Hery, 2013).

Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan sebagai : “proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”.

Sedangkan menurut *American Intitute of Certified Public Accountans* (AICPA), akuntansi adalah : “seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya”.

2.1.1.2 Pemakai Akuntansi

Menurut (Priyanto, 2009) pemakai akuntansi dibedakan menjadi pihak *internal* dan *eksternal*. Pihak internal adalah pihak yang berada dalam perusahaan

atau lembaga seperti pimpinan perusahaan manajer, dan karyawan. Pimpinan perusahaan dan manajer memerlukan akuntansi untuk perencanaan usaha, pengambilan keputusan, pengawasan perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau lembaga tetapi berada di luar perusahaan, seperti pemilik perusahaan atau pemegang saham, investor, bank sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dan pemerintah.

Pemilik perusahaan atau pemegang saham memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kekayaan perusahaan dan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan, karena pemegang saham akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar jika perusahaan mengalami laba yang besar. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan apakah akan menanamkan modalnya atau tidak. Kreditur memerlukan informasi akuntansi untuk melihat kemampuan perusahaan atau suatu usaha dalam melunasi utang-utangnya karena kreditur membutuhkan jaminan atas kredit yang telah dipinjamkan. Sedangkan pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan pajak, untuk pengawasan atas pemberian gaji atau upah, dan menyusun statistik.

2.1.1.3 Siklus Akuntansi

Menurut (Nusa, 2016) tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan disebut siklus akuntansi. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi yang harus dipahami, yaitu :

1. Analisis transaksi keuangan

Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi keuangan. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari transaksi yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan untuk menentukan pengaruhnya terhadap akun-akun dalam persamaan akuntansi pada penyusunan laporan keuangan yang digunakan.

2. Pencatatan transaksi

Pada tahap ini, transaksi dicatat sesuai dengan bukti transaksi yang meliputi akun-akun pada aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya melalui persamaan dasar akuntansi, yaitu $Aset = Utang + Ekuitas$.

3. Proses *posting*

Setelah melakukan jurnal, tahap berikutnya adalah melakukan *posting* ke buku besar. Pada umumnya yang dilakukan pada tahap ini adalah mencatat tanggal transaksi, menuliskan keterangan transaksi yang dilakukan, dan mencatat jumlah rupiah pada setiap transaksi sesuai debit dan kreditnya.

4. Menyusun neraca saldo

Neraca saldo merupakan daftar yang menyajikan saldo akun yang bersal dari buku besar. Untuk menyusun neraca saldo, maka saldo akhir dari masing-masing buku besar disajikan pada neraca saldo yang telah disiapkan.

5. Membuat jurnal penyesuaian

Pada akhir periode, biasanya dilakukan penyesuaian pada akun-akun, antara lain perlengkapan (*suplies*), biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang penghasilan, utang beban, kerugian piutang, dan penyusutan aset tetap.

6. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian

Pada tahap selanjutnya, neraca saldo perlu diperbaharui setelah ada penyesuaian di beberapa akun.

7. Menyusun laporan keuangan

Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, langkah berikutnya memilah akun-akun yang disajikan pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

8. Membuat jurnal penutup

Tahap ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menutup akun nominal pada akhir periode.

9. Neraca saldo setelah penutupan

Tahap terakhir dalam siklus akuntansi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keseimbangan posisi keuangan sehingga untuk periode akuntansi selanjutnya dapat digunakan untuk memulai siklus akuntansi.

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Indonesia memiliki standar akuntansi yang berlaku umum yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). IAI adalah organisasi profesi yang mewadahi para akuntan di Indonesia dan memiliki peran dalam penyusunan SAK. (Hetika & Nurul Mahmudah, 2017)

Menurut (Hetika & Nurul Mahmudah, 2017) dalam penelitiannya SAK merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dengan adanya SAK ETAP maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Didalam beberapa hal SAK–ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Menurut (*Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, 2016) Bab 1, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- (a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- (b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- (a) Entitas telah mengajukan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau

(b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

2.1.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.3.1 Defenisi dan Karakteristik UMKM

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM adalah kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM diatur sdalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM.

Pemerintah yang memberikan kriteria untuk masing-masing UMKM itu diharapkan tepat sasaran dalam pengembangannya. Bahkan beberapa instansi memberikan defenisi tersendiri UMKM, yaitu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UMKM), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994.

Berdasarkan Kementerian Negara dan Usaha Kecil Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah). Usaha Menengah (UMI) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja, usaha kecil adalah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. Usaha menengah adalah entitas yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/kmk.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (enam ratus ribu rupiah) atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas bidang usaha (firma, CV, PT, koperasi) serta perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga jenis sesuai kriteria berdasarkan jumlah aset dan omzet seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset \leq Rp 50 juta dan omzet \leq Rp 300 juta.
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Rp 50 juta $<$ aset \leq Rp 500 juta dan Rp 300 juta $<$ omzet \leq Rp 2,5 milyar.
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Rp 500 juta $<$ aset \leq Rp 2,5 milyar dan Rp 2,5 milyar $<$ omzet \leq Rp 50 milyar.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berikut karakteristik UMKM dan usaha besar berdasarkan karakteristiknya:

1. Usaha Mikro
 - a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.

- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat piundah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya belum mempunyai akses kepada perbankan, tetapi sebagian besar sudah mempunyai akses kepada lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- h. Misalnya, usaha perdagangan seperti kaki lima dan pedagang besar.

2. Usaha Kecil

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c. Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
- d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- e. Sudah membuat rencana usaha.
- f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

- g. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- h. Sebagian besar sudah mempunyai akses kepada perbankan untuk keperluan modal.
- i. Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha seperti perencanaan bisnis.
- j. Misalnya, pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

3. Usaha Menengah

- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi secara teratur sehingga memudahkan untuk melakukan audit dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi pemburuhan.
- d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- e. Sudah memiliki akses kepada sumber pendanaan perbankan.
- f. Umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
- g. Misalnya, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmaer buatan.

4. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah,

yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Ciri-ciri perusahaan kecil yang lainnya adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok relatif kecil-kecil, daerah operasinya lokal, dan ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Adapun contoh usaha kecil seperti usaha tani dengan tanah perorangan dan memiliki tenaga kerja, pedagang grosir, industri makanan dan minuman, alat rumah tangga, kerajinan tangan, peternakan dan koperasi skala kecil.

1. Kriteria Usaha Menengah

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 - Rp. 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 - 50.000.000.000,00.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2) .

Kriteria usaha menengah sama dengan usaha kecil hanya perbedaannya terletak pada jumlah kekayaan bersihnya. Yang digolongkan ke dalam usaha menengah adalah mereka pemilik kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualannya pun bisa mencapai paling banyak Rp.100 juta per tahun. Ciri-ciri usaha menengah yaitu sebagai berikut:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
4. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Cotoh usaha menengah adalah usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah; usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor; jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi; usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam; usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh (Supriono & Yuliana, 2017) yang berjudul analisis penerapan siklus akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Purworejo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan siklus akuntansi pada UKM di Kabupaten Purworejo masih sangat kurang dan ada yang tidak menerapkan siklus akuntansi pada pengelolaan usahanya. Penerapan

siklus akuntansi pada UMKM hanya sampai pada tahap pencatatan sebesar 17% dan sebesar 33% yang memiliki bukti transaksi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Hetika & Nurul Mahmudah, 2017) yang berjudul penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UMKM Kota Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana dan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai SAK ETAP.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Neneng Salmiah, 2015) yang berjudul analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP (pada UMKM di Kecamatan Sukajadi binaan DisKop & UMKM kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru masih sangat sederhana atau tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi dan rata-rata belum sesuai dengan SAK ETAP.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Puspitaningrum D.K, Kurniawati, & Metana, 2017) yang berjudul pelaporan keuangan pada UMKM di Surabaya (studi pada UKM Diah Cookies). Hasil dari penelitian ini menunjukkan UKM Diah Cookies sebenarnya sudah melakukan proses/pencatatan akuntansi dengan sangat sederhana /manual di buku pencatatan kas, akan tetapi data/catatan yang direkap secara manual tersebut tidak lengkap dan tidak jelas.

Selanjutnya (Meiliana & Dewi, 2012) melakukan penelitian yang berjudul analisis penggunaan sistem informasi akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas UKM di Yogyakarta menggunakan SIA, perusahaan manufaktur menggunakan informasi akuntansi secara lebih intensif dibandingkan dengan perusahaan dagang dan jasa (pada kasus responden yang diteliti). Perusahaan dagang lebih menggunakan SIA yang lebih intensif dibanding perusahaan jasa. Perusahaan menengah mayoritas menggunakan informasi akuntansi secara lebih intensif dibanding perusahaan kecil.

Selanjutnya (Aini & Order, 2016) melakukan penelitian yang berjudul analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada toko pakaian di Gajah Mada Plaza Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku UKM di GMP Malang tidak ada yang berkeinginan melakukan pelatihan di bidang akuntansi. Hal ini dikarenakan pandangan responden bahwa tanpa memahami akuntansi usaha tetap berjalan dan yang penting tidak mempengaruhi laba. Dengan demikian pelaku UKM tidak mempunyai motivasi untuk memajukan usahanya supaya lebih berkembang. Berdasarkan uraian peneliti terdahulu di atas, dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
.1.	Supriono Desy Yuliana	Analisis Penerapan Siklus Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survey dan kuisioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan siklus akuntansi pada UKM di Kabupaten Purworejo masih sangat kurang dan ada yang tidak menerapkan siklus

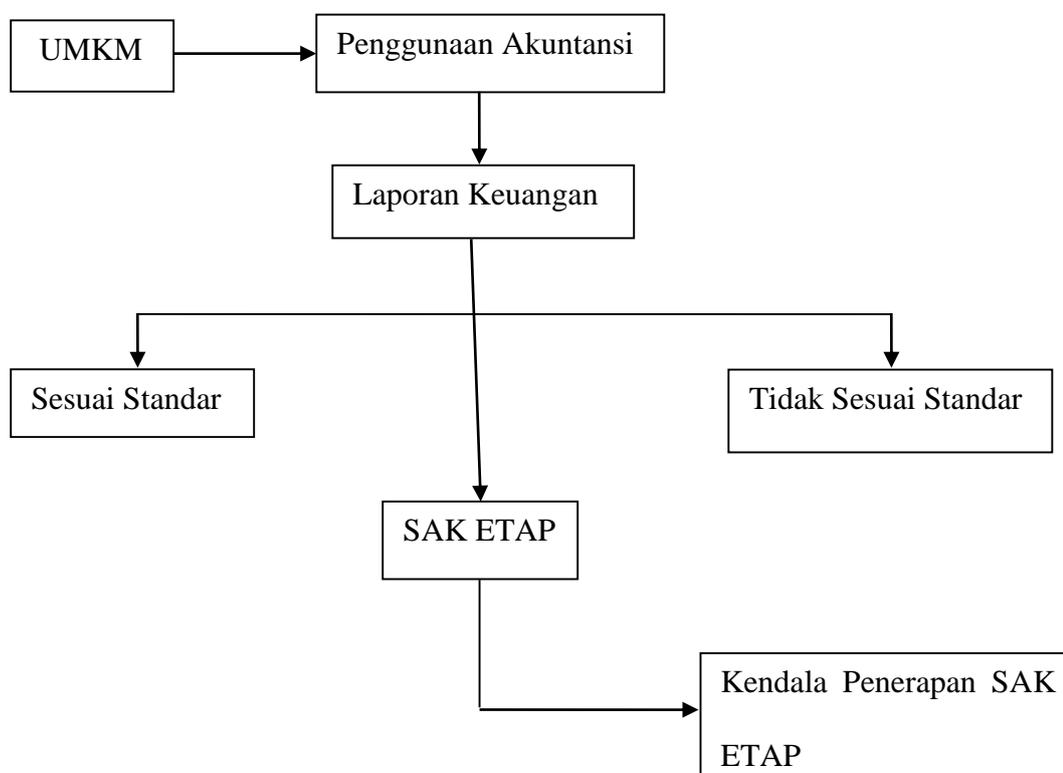
	Volume 12 No.1, Januari 2017 ISSN: 1907-426X	Kabupaten Purworejo		akuntansi pada pengelolaan usahanya. Penerapan siklus akuntansi pada UMKM hanya sampai pada tahap pencatatan transaksi sebesar 17% dan sebesar 33% yang memiliki bukti transaksi.
2.	Hetika, Nurul Mahmudah Vol. 5, No. 2, Desember 2017, 259- 266 E-ISSN: 2548-9836	Penerapan Akuntansi dan Kesesuaian nya Dengan SAK ETAP pada UMKM Kota Tegal	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana dan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai SAK ETAP.
3.	Neneng Salmiah, Indarti dan Inova Fitri Siregar Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, April 2015 : 212 - 226 ISSN 2337-4314	Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaian nya dengan SAK ETAP (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru)	Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampel</i> .	Bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas. Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih sangat sederhana atau tidak. Mengikuti tahapan- tahapannya dalam siklus akuntansi, dan rata-rata belum sesuai dengan SAK ETAP.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2016) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Menurut (Imam Ghazali, 2016) kerangka pemikiran teoritis adalah dasar penelitian deduktif yang kita gunakan dan isinya logika yang dibangun dan dijelaskan tentang hubungan antara variabel yang dianggap relevan untuk menjawab masalah penelitian dan diidentifikasi lewat proses wawancara, observasi dan kajian literatur.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran